



Strategi Pemberdayaan Pembangunan Pendidikan: Studi Kasus Distrik Beoga Barat Kabupaten Puncak

Miren Kalabetme, Afelinus Lefaan

Program Magister Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: mirenkalabetme@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Strategy, Empowerment, Development, Education and Papua

How to Cite:

Kalabetme, M., Lefaan, A. (2023). Strategi Pemberdayaan Pembangunan Pendidikan: Studi Kasus Distrik Beoga Barat Kabupaten Puncak. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(3): 155-168

DOI:

10.31957/jeb.v11i3.3288

This article aims to analyze the implementation of the tasks and functions of educational empowerment, analyze the role of the government in educational empowerment, and analyze the strategies of educational empowerment in Beoga Village, West Beoga District, Puncak Regency. Research method: Case study method. This thesis concludes several things as follows: The tasks and functions of educational empowerment in West Beoga District can be said to be not going well, especially in implementing the tasks and functions of education as an actor in socializing the nation's socio-cultural ideology and values, preparing the workforce to reduce poverty, ignorance and promote social change, and equal distribution of income and opportunities, caused by the security conditions (conflict areas) that resulted in the absence of learning activities in schools, in addition to the absence of teachers who were displaced and afraid of the conflict, as well as the reluctance of students to go to school due to the conflict that occurred. The role of educational empowerment as community servants, facilitators and provision of funds is not working well in North Beoga district, this can be seen from the lack of development of existing educational facilities and infrastructure such as local classes, reading books, curriculum, teaching aids and the inadequate quality of teachers. This role is also not optimal due to the lack of local government budget support for the education sector. The educational empowerment strategy, especially in improving the quality of teachers and students, is not working well. This condition is characterized by the lack of development of teachers' competence and professionalism through education and training, technical guidance and strengthening of other competencies, thus affecting the quality of education services in West Beoga District.

Copyright © 2023 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Strategi, Pembedayaan, Pembangunan, Pendidikan, Papua

Cara Mengutip:

Kalabetme, M., Lefaan, A. (2023). Strategi Pembedayaan Pembangunan Pendidikan: Studi Kasus Distrik Beoga Barat Kabupaten Puncak. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 11(3): 155-168

DOI:

10.31957/jeb.v11i3.3288

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi tugas dan fungsi pemberdayaan pendidikan, menganalisis peran pemerintah dalam memberdayakan pendidikan dan menganalisis strategi pemberdayaan pendidikan di Kampung Beoga Distrik Beoga Barat di Kabupaten Puncak. Metode penelitian Metode Kaulitatif dengan Study Kasus. Tesis ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut Tugas dan fungsi pemberdayaan pendidikan di Distrik Beoga Barat dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik, khususnya dalam implementasi tugas dan fungsi pendidikan sebagai pelaku memasyarakatkan ideologi dan nilai nilai sosiokultural bangsa, mempersiapkan tenaga kerja untuk mengurangi kemiskinan, kebodohan dan mendorong perubahan sosial, dan pemerataan pendapatan dan kesempatan, yang disebabkan oleh kondisi keamanan (daerah konflik) yang membuah aktivitas belajar disekolah tidak berjalan, disamping ketiadaan guru yang mengungsi dan takut akibat konflik, serta keengganan siswa untuk sekolah akibat konflik yang terjadi. Peran pemberdayaan pendidikan sebagai pelayan masyarakat, fasilitator dan penyedian dana tidak berjalan dengan baik di Distrik Beoga Utara hal in terlihat dari tidak dikembangkannya sarana dan prasaran pendidikan yang ada seperti lokal kelas, buku bacaan, kurikulum, alat peraga serta kualitas guru yang kurang memadai. Peran peran ini tidak berjalan optimal juga disebabkan oleh dukungan penganggaran pemerintah daerah yang kurang terhadap bidang pendidikan. Strategi pemberdayaan pendidikan khususnya pada peningkatan kualitas guru dan siswa tidak berjalan baik, kondisi ini ditandai dengan kurangnya pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, dan penguatan kompetensi lainnya, sehingga berdampak pada kualitas layanan pendidikan di Distrik Beoga Barat.

Hak Cipta© 2023 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Gagasan tentang pemberdayaan dapat memiliki fokus yang kuat pada individu, khususnya dalam orientasi yang lebih bersifat psikologis. Sehingga tidak mengherankan apabila ide mengenai pemberdayaan melekat pada psikologi, mengingat psikologi berasal dari komitmen Barat terhadap individualisme. Pemberdayaan pada bidang kesehatan misalnya, muncul melalui gagasan tentang pemberdayaan 'diri'dan hubungannya dengan kesejahteraan, kepercayaan diri, dan harga diri (Woodall, et al., 2012). Dalam bentuk lebih khusus di bidang pendidikan dan pembangunan, respons kritis terhadap pemberdayaan terfokus pada reifikasi individu, yang menegaskan kurangnya perhatian terhadap penataan tingkat makro yang lebih luas.

Dalam melihat sasaran pemberdayaan, tidak semua masyarakat menjadi sasarannya. Tetapi, sasarannya adalah anggota masyarakat yang termarjinalkan dalam

program-program pembangunan, dan minim dalam akses sumber daya. Singkatnya, mengembangkan masyarakat yang mandiri merupakan tujuan utama pemberdayaan (Widjajanti, 2010: 17). Negara-negara berkembang saat ini menghadapi banyak persoalan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, terutama masalah kemiskinan. Persoalan ini melingkupi penghasilan dan angka pengangguran yang memperluas dampaknya dalam bidang sosial dan politik (Suryawati, 2004).

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2020, sebanyak 26,42 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada bulan September 2022 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57% atau sebesar 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, dan munculnya berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat (Erlyn et al., 2022). Pengentasan kemiskinan di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dengan tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan, Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022). Daerah pedesaan menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin di Indonesia (Agustina & Yahya, 2022), menciptakan tingkat kerentanan yang tinggi di wilayah pedesaan di Indonesia. Secara spasial, angka kemiskinan per September 2022 mengalami sedikit peningkatan baik di perkotaan maupun pedesaan. Angka kemiskinan di perkotaan naik menjadi 7,53% (Maret 2022: 7,5%). Persentase penduduk miskin di pedesaan juga meningkat menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,29%) (BPS, 2022). Proporsi penduduk miskin di Indonesia menempati urutan keempat di ASEAN dengan persentase 1,8% setelah Timor Leste, Laos, Filipina, kemudian Indonesia (Jayani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki proporsi penduduk miskin yang tinggi di Asia Tenggara (Jayani, 2021). Namun, berbagai kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan, terutama di tingkat desa sejauh ini belum berjalan optimal. Masalah ini terjadi karena masyarakat seringkali distigmakan sebagai objek dari program pemerintah, sehingga keterlibatan masyarakat terbatas pada penggunaan hasil program (Kartasasmita, 1996).

Dengan kompleksitas masalah pembangunan di pedesaan tersebut, beberapa ahli berpandangan bahwa dimensi pemberdayaan meliputi semua bidang, dari sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas agar masyarakat dapat memiliki kemampuan dalam mendorong kualitas maupun standar hidup (Friedman, 1992). Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk di Kampung Beoga Distrik Beoga Utara. Adapun pertimbangan lokus penelitian di Beoga, Distrik Beoga Utara dilakukan karena terdapat berbagai persoalan yang menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan seperti pendidikan, ekonomi, sumber daya, dan berbagai masalah eksternal seperti keamanan yang menyebabkan keterlibatan masyarakat minim. Sekian masalah yang dihadapi, penelitian ini fokus pada pemberdayaan yang berkaitan dengan pendidikan.

Data terkait pembangunan bidang pendidikan di kabupaten Puncak, Selama setahun belakangan, para pelajar tak dapat bersekolah akibat gangguan keamanan di daerah yang berada di kawasan pegunungan Papua tersebut. Dampak gangguan keamanan di daerah itu menyebabkan kegiatan belajar tidak dapat berjalan normal. Para pelajar terpaksa mengikuti kegiatan belajar di rumah guru dan fasilitas aula milik Pemkab Puncak dengan melibatkan anggota Binmas Polri. Gangguan keamanan ini akibat ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di

Kabupaten Puncak sejak tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan banyak guru mengungsi dari Puncak ke Mimika dan sejumlah kabupaten lainnya. Pada tahun ini sembilan warga sipil dan empat prajurit TNI meninggal akibat serangan kelompok tersebut. Dari pendataan BPS, hingga tahun 2022, terdapat 33 sekolah dasar, 7 sekolah menengah pertama, 4 sekolah menengah atas, dan 1 sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Puncak. Terdapat 4.669 pelajar yang tersebar di tiga jenjang sekolah tersebut (Costa, 2022). Dalam kondisi demikian, kondusifitas kegiatan belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar hingga menengah terganggu, bahkan tidak berjalan. Pendekatan untuk mendorong pengembangan kapasitas masyarakat dalam kondisi tersebut tidak dapat mencapai pemberdayaan yang ideal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena atau situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus sebagaimana definisinya merupakan penelitian yang meliputi pemahaman mendalam mengenai individu, kelompok, dan organisasi mengenai kegiatannya, serta memiliki batasan waktu tertentu.

Tempat penelitian yang dijadikan obyek atau sasaran dalam penelitian tentang Strategi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat (studi Kasus Kampung Beoga Distrik Beoga Barat Kabupaten Kabupaten Puncak) lokasi kampung beoga berada di perbatasan antara Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

Adapun informan penelitian adalah Dinas pendidikan 1 orang, Tenaga guru 3 orang, Tokoh masyarakat 2 orang, Tokoh adat 2 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1. Implementasi tugas dan fungsi pemberdayaan pendidikan

Pemberdayaan pendidikan masyarakat dalam kaitannya dengan penelitian ini merupakan proses yang dilakukan dalam jangka panjang pada seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan utama pemberdayaan pendidikan dalam hal ini adalah untuk memacu terjadinya peningkatan kesejahteraan secara holistik. Hal ini selaras dengan pendapat John C. Bock dalam Philip et al. (1982) yang menjelaskan bahwa tugas utama pendidikan adalah menyebarkan ideologi dan nilai-nilai sosial dan budaya pada sebuah bangsa. Lebih lanjut menurut Bock, tugas pendidikan adalah membangun persiapan bagi tenaga kerja dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

3.1.1.1. Memasyarakatkan ideologi dan nilai nilai sosiokultural bangsa

Dalam konteks kehidupan masyarakat, budaya dan pendidikan memiliki sinergi yang berkaitan satu sama lain. Budaya merupakan jelmaan aktivitas, dan sistem pendidikan yang mengarahkan masyarakat untuk pengembangan

kebudayaannya. Sedangkan pendidikan pada sisi lain identik dengan kegiatan kebudayaan. Bentuk pendidikan yang masih eksis di Indonesia hingga saat ini adalah pendidikan formal yang terlembagakan melalui sekolah formal dan pendidikan non formal yang terlembagakan pada luar koridor sekolah formal. Indonesia menggunakan sistem politik yang berlandaskan Pancasila. Kondisi ini tergambar dalam wawancara dengan informan terkait pendidikan sebagai ideologi dan nilai sociocultural bangsa:

Saya sudah bertugas di beoga lebih kurang 10 tahun proses belajar mengajar waktu waktu lalu itu sangat baik dan lancar disebabkan penerapan kurikulum itu berdasarkan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat. Jadi anak anak diajarkan budi pekerti yang baik seperti bagaimana menghargai orang tua, orang lebih tua dalam keluarga, menampilkan perilaku yang baik dalam bermasyarakat serta penanaman nilai nilai Pancasila yang sangat berguna bagi anak anak untuk memastikan bahwa mereka tahu dan paham bagaimana berbudaya dan bertindak sebagai orang beoga dan orang Indonesia.

*Tapi hari ini proses itu tidak bisa terjadi disebabkan opm sudah membakar sekolah kami sehingga anak anak lebih banyak tidak bersekolah, apalagi di kampung yang jauh dari distrik mereka ketakutan untuk pergi ke sekolah, ditambah guru guru yang lari dan mengungsi sehingga kami sangat kekurangan tenaga pengajar sehingga proses belajar mengajar menjadi terhambat. Jadi proses penanaman nilai, kemampuan siswa dan lainlain tra berjalan di sekolah dengan baik
(Informan Penelitian, Juli 2023)*

*Iyo dorong opm bikin tong pu anak anak tra bisa sekolah sehingga macam tambah bodoh saja, sekarang dong kerja hanya taputar taputar di kampung tra bisa sekolah karena gedung kelas sudah dibakar dan guru guru juga sudah tra ada di distrik jadi kami minta pemerintah untuk perhatikan barang ini kalo tidak tong tra tahu anak anak ini mau jadi apa nanti
(Informan Penelitian, Juli 2023)*

Dalam kondisi diatas jelas peran pemerintah dalam menjalankan fungsi politik pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan kemampuan melindungi, memelihara ketertiban umum tidak berjalan. Kondisi rusaknya sarana sekolah dan tidak adanya guru akibat merasa terancam serta partisipasi sekolah anak yang tidak ada akibat ancaman keamanan serta ketakutan beraktivitas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan fungsi politik pendidikan di Distrik Beoga Barat Kabupaten Puncak Papua Pegunungan Tengah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurtanio Agus Puwanto, (2008) yang menjelaskan bahwa pendidikan bukan alat politik. Melampaui itu, menurut Purwanti, politik dan pendidikan selalu berkaitan selama tujuannya selaras dengan kebutuhan negara. Hal ini dapat dilihat dari perancangan dan pelaksanaan hukum yang dicapai melalui pendidikan politis. Sehubungan dengan pendidikan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 c dan pasal 31 secara garis besar mengamanatkan kesetaraan hak untuk akses pendidikan.

3.1.1.2. Mempersiapkan tenaga kerja untuk mengurangi kemiskinan, kebodohan dan mendorong perubahan sosial

Pada dasarnya pendidikan memiliki korelasi dengan tujuan pembangunan dan dorongan kesejahteraan. Peran pendidikan dalam proses pembangunan sangat strategis tersebut memicu terjadinya dua paradigma. Pertama paradigma fungsional yang meninjau bahwa kemiskinan yang terjadi disebabkan lemahnya pengetahuan masyarakat akan inovasi. Paradigma kedua adalah sosialisasi yang merujuk pada peran pendidikan dalam pengembangan kapabilitas individual, produktifitas, dan lemahnya kapabilitas masyarakat dalam hal kompetensi.

Pendidikan dalam kaitannya dengan ekonomi, mempreferensikan kapabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan tertentu untuk meningkatkan penghasilan. Sejak 2002, pemerintah menggerakkan pemberdayaan melalui pendidikan. Akan tetapi, sejauh ini tingginya angka kemiskinan yang mencapai 36% di Kabupaten Puncak Papua Pegunungan Tengah membuktikan bahwa pelaksanaan pemberdayaan belum optimal. ‘

Kondisi ini tergambar dari hasil wawancara dengan informan penelitian dilapangan sebagai berikut :

Kasih anak anak disini umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak punya penghasilan tetap hanya mengandalkan hasil kebun yang dikarenakan cuaca yang ekstrim selalu mengakami gagal panen. Akhirnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak anak menjadi kendala yang berat. Macam kemampuan membeli baju sekolah umumnya tra pernah diganti kurun waktu sangat lama, kelengkapan sekolah seperti buku pinsil bolpen dan yang lainnya umumnya tidak memilikinya ditambah asupan makan sebelum sekolah nyaris tidak ada mereka ke sekolah hanya dnegan meminum air putih saja tanpa asupan makanan untuk sarapan pagi. Inilah potret pendidikan di distrik ini bapa kami tra bisa berbuat apa apa hanya bisa lihat saja

Bagaimana mau meingkatkan pengetahuan, mengurangi kemiskinan dan memberikan pekerjaan yang layak kalo kualitas dan mutu pendidikan tra dijaga, ini yang dasar saja hak bersekolah hampir tak terpenuhi dengan baik (Informan penelitian, Juli 2023)

Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan bagi anak anak di distrik sangat kurang bahkan tidak ada anggaran terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka, kami sudah bersyukur kalo mereka masuk sekolah walaupun dengan kepengkapan sekolah yang apa adanya seperti sepatu robek bahkan ada yang tidak bersepatu, buku tulis yang tidak ada pena dan bulpen yang tidak ada jadi mereka datang hanya bawa badan saja untuk sekolah tapi semangat bersekolah mereka yang kami apresiasi dan hargai makanya kami juga tra nyaman dan tra suka kalo sarana sekolah di hancurkan jadi anak anak ini tra punya masa depan

Bagaimana mau mnyiapkan sumber daya manusia yang baik kalo kondisi masih seperti ini jadi perubahan yang kami harapkan untuk anak anak akan sangat berat untuk mendapatkannya (Informan Penelitian Juli 2023)

Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat di lokasi penelitian. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat berada dalam garis kemiskinan. Sementara pada sisi lain, akses pendidikan yang sulit membuat sebagian besar anak-anak tidak melanjutkan sekolah, terutama pada sekolah formal. Temuan dalam penelitian ini selaras dengan penelitian Hamdan yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan harusnya dimulai dari tataran keluarga, dan pemerintah meningkatkan program perpustakaan seperti perpustakaan keliling, dan program-program sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat agar mampu menggunakan kompetensinya untuk kebutuhan ekonomi.

3.1.1.3. Meratakan kesempatan dan pendapatan

Dalam konteks Distrik Beoga Barat dapat digambarkan tentang ketimpangan pendidikan melalui deskripsi hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut :

Kalo kami lihat anak anak yang datang sekolah disini berdasarkan jenis kelamin penduduk, kondisi ketimpangan pendidikan yang rendah banyak dari anak laki laki. Anak laki-laki dorang relatif lebih merata kedatangannya disekolah dibanding anak perempuan dorang. Masih banyak anak perempuan yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan hanya berdiam diri di rumah untuk membantu tugas pekerjaan dong pu orang tua. Kondisi yang lain yang bikin anak perempuan tidak datang sekolah yaitu masih terdapat pandangan masyarakat beoga bahwa perempuan hanya mengurus tugas rumah tangga, dan keselamatan anak perempuan tidak aman jika jauh dari pengawasan orang tua

Ketimpangan lainnya itu, kebutuhan sekolah tak sebanding dengan ketersediaan dana, sehingga kebutuhan dasar pendidikan agak susah kami mencapainya, seperti pengadaan buku paket dan buku baca yang kurang, alat bantu mengajar dan alat peraga untuk membantu anak mengerti tentang apa yang kami sampaikan. Kesempatan bersekolah dibuka seluas luasnya namun partisipasi sekolah sangat terbatas disebabkan banyak faktor diantaranya kondisi ekonomi keluarga, pendidikan rendah, konflik dan budaya masyarakat sini

(Informan Penelitian Juli 2023)

Berdasarkan keterangan informan tersebut, dapat ditarik interpretasi bahwasanya pendidikan formal saat ini mengalami tiga keterbatasan. Pertama, ketimpangan akses pendidikan berdasarkan gender dimana laki-laki lebih banyak termotivasi untuk bersekolah. Kedua, fasilitas pendukung untuk kegiatan pendidikan yang dihadapi sekolah diantaranya pendanaan dan alat-alat peraga untuk kegiatan belajar mengajar. Ketiga, pendapatan ekonomi keluarga yang rendah merupakan faktor penghambat terbesar bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Keempat, faktor budaya dan konflik yang terjadi menghambat aktifitas pendidikan yang seharusnya kondusif menjadi terganggu. Hasil temuan penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian Riyadi, dan Dinny Ghuzini (2020) yang menunjukkan tingkat

ketimpangan pendapatan dan gender berpengaruh terhadap akses pendidikan, khususnya di kawasan timur Indonesia.

3.1.2. Peran pemerintah dalam memberdayakan pendidikan

Sihombing (2001) berpendapat bahwa dalam penataan dan pelaksanaan pendidikan, pemerintah dapat berperan sebagai pelayan masyarakat, memberikan fasilitas, dan pendanaan untuk mendukung tujuan utama pendidikan di tanah air. Peran ini juga berpengaruh terhadap pemerataan akses pendidikan dengan memprioritaskan anggota masyarakat yang tidak mampu. Hal ini menuntut adanya perubahan dalam hirarki pendidikan yang selama ini menempatkan pemerintah di posisi atas berada di bawah untuk mendorong pendidikan sebagai prioritas tertinggi.

3.1.2.1. Pelayan Masyarakat

H.A.R. Tilaar (2003: 143) berpendapat bahwa pendekatan fungsi negara sebagai pelayan masyarakat bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amendemennya mengenai pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara, dan ditegaskan penganggaran APBN untuk pendidikan sebesar 20% yang telah dilakukan sejak 2009. Saat ini, setelah otonomi daerah dan otonomi pendidikan diberlakukan, peran pemerintah daerah terbuka untuk meningkatkan kualitas pendidikan meskipun terhambat dalam berbagai aspek seperti sumber daya.

Kasihannya tong punya sarana dan prasarana macam (buku, meja dan kursi, media pembelajaran, ruang kelas, guru, kurikulum, alat peraga dan pelatihan guru) sangat kurang dimana barang ini merupakan faktor penting dalam suatu proses pembelajaran karena dapat menambah minat dan kemauan anak-anak dalam proses belajar mengajar sekaligus dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Macam Kurangnya prestasi anak selain dipengaruhi oleh tenaga pengajar juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Macam-macam ini yang seharusnya menjadi program pemerintah daerah khususnya di bagian barat agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada pada sekolah. Ditambah faktor keamanan yang tidak bisa dijamin oleh pemda menambah buruk layanan pendidikan disini.

(Informan Penelitian, Juli 2023)

3.1.2.2. Peran sebagai fasilitator,

Pelayanan dalam pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan (Jusnaeni, 2017). Pentingnya peran sektor pendidikan dalam pembangunan diantaranya sebagai penyedia sumber daya manusia, pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor pembangunan lainnya. Sehubungan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pendidikan adalah mendukung fasilitas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kalo kami disini pemerintah sudah datang bangun sarana pendidikan macam gedung sekolah dan isinya namun sarana dan prasarana lainnya masih dirasakan kurang khususnya sarana penunjang pembelajaran,

*sehingga kami mengalami kesulitan untuk peningkatan kualitas belajar anak, ditambah pemerintah daerah juga tidak mendukung dan memfasilitasi layanan pendidikan dengan peraturan daerah dan putusan bupati untuk bantu peningkatan layanan pendidikan disini. Ditambah dukungan lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga yang kurang terhadap keberadaan sekolah disini.
(informan penelitian Juli 2023)*

3.1.2.3. Peran sebagai penyandang dana

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pasal 45 memberikan penjelasan detail mengenai perlunya kehadiran pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk memajukan pendidikan, termasuk pendanaan. Ukuran ini dapat dilihat melalui perspektif diversitas kebutuhan antara daerah pelosok dengan lembaga pendidikan lain yang ada di perkotaan.

Kondisi inilah yang dialami layanan pendidikan di Distrik Beoga Barat dimana dari sisi sarana prasarana yang merupakan parameter utama pembangunan bidang pendidikan tidak tersedia dengan baik, ditambah kondisi keterpencilan serta dukungan pemerintah, masyarakat dan keluarga yang kurang. Dukungan penganggaran dirasa kurang terkait penyediaan sarana dan prasarana sekolah, distribusi pendapatan guru yang kurang, penyediaan dana operasional sekolah yang kurang serta dukungan pendanaan lainnya bidang pendidikan yang masih dirasakan sangat kurang ditambah umumnya murid berasal dari keluarga miskin.

3.1.3. Strategi pemberdayaan Pendidikan

Jaelani & Asvio (2019) berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu parameter peradaban sebuah bangsa. Semakin tinggi pendidikan penduduk di suatu negara, maka kesejahteraan akan mudah dicapai, sekaligus meningkatkan pendapatan ekonominya. Pembangunan saat ini diarahkan bukan lagi pada pengembangan dan ekstraksi sumber daya alam, tetapi mengarah pada pembangunan SDM melalui pendidikan.

Oleh karena itu, SDM pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kontekstualisasi solusi berbasis masalah serta melakukan berbagai perubahan tradisional menjadi model pendidikan yang inovatif. SDM dalam hal ini merujuk pada SDM pendidik dan organisasi sekolah yang mendukung tercapainya visi misi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks Beoga Barat strategi pemberdayaan pendidikan dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara sebagai berikut

*Kalo kami disini jangankan peningkatan kapasaitas guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan atau bimtek setiap hari bisa ngajar dan memenuhi kebutuhan sudah sangat bagus. Jadi kami tidak terlalu berharap ada perhatian terkait pengembangan kualitas guru yang kompeten dan profesional. Ditambah daerah ini daerah konflik jadi tong tra bisa buat apa apa padahal bagus kalo tong dapat pelatihan tong bisa mengembangkannya di sini untuk anak anak beoga yang jauh lebih baik lagi kedepannya.
(Informan penelitian, Juli 2023)*

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik dan keamanan merupakan salah satu penghambat dalam pemberdayaan pendidikan. Hal ini berdampak pada lemahnya pendekatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan bagi guru. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan pendidikan yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah pentingnya menjaga stabilitas wilayah agar memberikan rasa aman terhadap dunia pendidikan terlebih dahulu. Kemudian, strategi selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM terutama guru yang menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik. Terakhir adalah Berbeda dengan hasil penelitian Ichi Kurniasih dkk yang menemukan bahwa strategi pemberdayaan sekolah dapat dilakukan melalui peningkatan SDM guru dan murid, meningkatkan fasilitas yang mendukung kualitas sekolah.

3.2. Pembahasan

Kesenjangan yang terjadi dalam pendidikan yang berhubungan dengan implementasi tugas dan fungsi pemberdayaan pendidikan di Distrik Bioga Barat disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu sebagai berikut yaitu faktor pendanaan, sumber daya manusia, konflik atau keamanan, dan infrastruktur pendidikan yang masih belum memadai. Dalam realitasnya pemerintah daerah belum mampu merealisasikan penganggaran sebagaimana amanat UU No. 20/2003 dan alokasi APBN serta APBD untuk kebutuhan pendidikan sebesar 20%.

Mengingat pendidikan merupakan suatu kewajiban, maka pemerintah Indonesia memberikan fasilitas penyelenggaraan pendidikan pada masa reformasi, didukung dengan kebijakan pembiayaan pendidikan yang salah satunya melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Memang benar bahwa pada dasarnya BOS bertujuan untuk mencakup berbagai kebutuhan atau pembiayaan pendidikan. Mulai dari kebutuhan sarana prasarana dan suprastruktur hingga kebutuhan peserta didik. Namun, kondisi untuk konteks penelitian menunjukkan ada faktor substansial yang menjadi akar ketimpangan pendidikan.

Tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia bahkan para pembuat kebijakan merasa sulit untuk mempertahankan kebijakan pendidikan, terutama yang berhubungan dengan pendanaan. Karena politisi secara tidak langsung andil melemahkan kebijakan pendidikan nasional dengan mengalihkan sumber daya ke pemerintah daerah, dimana dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan dukungan politik (Walton & Hushang, 2021). Selain itu, ditemukan hasil penelitian yang kontradiktif, dimana pengalaman negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan seringkali gagal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (Bentaouet-Kattan, 2006; Rosser & Joshi, 2013; Somerset, 2009; Walton & Hushang, 2021). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang didukung pendanaan pemerintah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kualitas pembelajaran atau pendidikan (Arends-Kuenning & Vieira, 2015; Chatterjee & Robitaille, 2018).

Selain pendanaan, faktor SDM pendidikan dalam hal ini guru, memerlukan pengembangan kompetensi melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan modal sosial sebagai pendidik. Ketidaksiharian antara kompetensi yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diajarkan membuat kinerja guru profesional menjadi buruk. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas siswa yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Artinya rendahnya kompetensi dapat berdampak pada buruknya kinerja pendidikan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sarmawa dkk. (2015), Sarwani (2016), dan Heriyanto dkk. (2018). Tantangan ini diperparah kondisi dimana di lokasi penelitian ini memiliki kuantitas yang dapat dikatakan minim, sehingga pembangunan pendidikan masih belum optimal.

Faktor selanjutnya adalah infrastruktur yang masih belum memadai. Terdapat berbagai kekurangan kaitannya dengan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan keterbatasan ini, maka pemerintah perlu mengambil peran sebagai pendukung pelayanan pendidikan melalui alokasi bantuan fasilitas yang secara langsung memberikan dukungan bagi kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Karena saat ini proses pembelajaran yang masih konvensional. Saat ini sekolah di Beoga Barat menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada.

Faktor selanjutnya adalah konflik di Beoga Barat. konflik bersenjata masih terus terjadi dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Justino (2014), kekerasan bersenjata mempunyai dampak negatif yang serius terhadap sistem pendidikan dalam tiga hal utama. Pertama, kekerasan bersenjata terkait dengan penghancuran sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga sistem pendidikan tetap beroperasi. Kedua, kekerasan menyebabkan terpecahnya komunitas sebagai akibat dari banyaknya orang yang melarikan diri dari tempat-tempat yang penuh kekerasan, yang berdampak pada cara dan tempat anak-anak dididik. Ketiga, dalam kaitannya dengan akses terhadap berbagai jenis pendidikan, kekerasan sering kali mempunyai dampak yang merata dan merata sehingga menghalangi banyak anak untuk bersekolah. Memang benar, kita tidak perlu mendalami literatur untuk memahami dampak kekerasan, seperti rusaknya infrastruktur sekolah, hilangnya kapasitas manusia, dan bahaya terhadap keselamatan dan keamanan anak-anak dan staf di lingkungan konflik aktif (Omoeva et al., 2018). Guru dan anak-anak dibunuh, diculik, menjadi cacat, atau mengalami trauma di sekolah yang diambil alih oleh angkatan bersenjata atau pengungsi (Jones & Naylor, 2014). Penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dan pemulihan sistem pendidikan sangat terhambat oleh kombinasi kehancuran dan pengungsian. Selain itu, kekerasan bersenjata mempunyai implikasi distribusi yang signifikan yang mempengaruhi kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pasokan pendidikan secara keseluruhan (Jaiswal, 2017).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, tugas dan fungsi pemberdayaan pendidikan di Distrik Beoga Barat dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik, khususnya dalam implementasi tugas dan fungsi pendidikan sebagai pelaku memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosiokultural bangsa, mempersiapkan tenaga kerja untuk mengurangi kemiskinan, kebodohan dan mendorong perubahan sosial, dan pemerataan pendapatan dan kesempatan, yang disebabkan oleh kondisi keamanan (daerah konflik) yang membuah aktivitas belajar disekolah tidak berjalan, disamping ketiadaan guru yang mengungsi dan takut akibat konflik, serta keengganan siswa untuk sekolah akibat konflik yang terjadi.

Peran pemberdayaan pendidikan sebagai pelayan masyarakat, fasilitator dan penyediaan dana tidak berjalan dengan baik di Distrik Beoga Utara hal ini terlihat dari tidak dikembangkannya sarana dan prasarana pendidikan yang ada seperti lokal kelas, buku bacaan, kurikulum, alat peraga serta kualitas guru yang kurang memadai. Peran

peran ini tidak berjalan optimal juga disebabkan oleh dukungan penganggaran pemerintah daerah yang kurang terhadap bidang pendidikan.

Strategi pemberdayaan pendidikan khususnya pada peningkatan kualitas guru dan siswa tidak berjalan baik, kondisi ini ditandai dengan kurangnya pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, dan penguatan kompetensi lainnya, sehingga berdampak pada kualitas layanan pendidikan di Distrik Beoga Barat.

Rekomendasi yang diberikan terkait temuan penelitian ini adalah kepada berbagai pihak yakni untuk mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan pendidikan khususnya di Distrik Beoga Barat memerlukan keterlibatan semua pihak dari pemerintah hingga masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan pemberdayaan pendidikan. Pemerintah dapat mengambil peran sebagai pelayan masyarakat maupun fasilitator sebagaimana amanat UUD 1945 dan regulasi lainnya yang mengatur tentang urusan pendidikan. Kemudian memastikan penyelenggaraan pendidikan khususnya di distrik beoga barat berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan dan ancaman konflik bersenjata, membangun kembali gedung sekolah yang terbakar, memastikan dukungan biaya pendidikan yang memadai dan mampu mencukupi kebutuhan dasar sekolah, peningkatan kompetensi guru dan siswa, serta kesejahteraan tenaga guru yang memadai dan terpenuhi. Dukungan regulasi khususnya dilevel distrik dan kampung terkait dukungan penganggaran bidang pendidikan yang memadai sebagai dasar pijakan dalam menyelenggarakan pemenuhan hak dasar masyarakat terkait pemenuhan hak dasar pendidikan.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 98-108.
- Arends-Kuening, M. P., & Vieira, R. (2015). Income inequality and educational inequality: Comparing the US and Brazil. *Policy Matters*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.
- Bentaouet, R. K. (2006). *Implementation of free basic education policy* (No. 47186, pp. 1-133). The World Bank.
- Chatterjee, I., Li, I., & Robitaille, M. C. (2018). An overview of India's primary school education policies and outcomes 2005–2011. *World Development*, 106, 99-110.
- Costa, F. M. L. (2022, September). *Setahun Terhambat Konflik, Para Pelajar di Kabupaten Puncak Kembali Bersekolah*. Avaluasi at: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/09/setahun-terhambat-konflik-para-pelajar-di-kabupaten-puncak-kembali-bersekolah> di akses tanggal 15 maret 2023.

- Erlyn, P., Hidayat, B., Cahyo, A., & Saksono, H. (2022). Investment in Human resources to increase achievement levels of sustainable development. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(1), 135-146.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers. Cambridge, USA.
- Heriyanto, T., Naser, J. A., & Setia, K. A. (2018). The effect of competence and discipline on work motivation and impact on employee performance of Pratama tax office in Malang Utara. *MEC-J (Management and Economics Journal)*, 2(3), 269-278.
- Jaelani, A., & Asvio, N. (2019, February). Evaluasi program pendidikan karakter di sekolah dasar. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Jaiswal, S. K. (2017). Role of parental involvement and some strategies that promote parental involvement. *Journal of International Academic Research for Multidisciplinary*, 5(2), 95-104.
- Jayani, D. W. (2021). Daftar Negara dengan Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Terbanyak di Asia Tenggara. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-dengan-penduduk-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-terbanyak-di-asia-tenggara>
- Jones, A., & Naylor, R. (2014). *The quantitative impact of armed conflict on education: Counting the human and financial cost*. Berkshire: CfBT Education Trust.
- Jusnaeni, S. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. *Universitas Hasanuddin. Skripsi*.
- Justino, B. P. (2014, September). Background Paper for Fixing the Broken Promise of Education for All Barriers to Education in Conflict-Affected. *Relief Web International*, 1–15. <http://allinschool.org/wp-content/uploads/2015/01/OOSC-2014-Conflict-and-education-final.pdf>
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES
- Omoeva, C., Hatch, R., & Moussa, W. (2018). The effects of armed conflict on educational attainment and inequality. *Connecticut Education Policy and Data Centre, Connecticut, Washington, DC*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

- Philip, B., Vita Carulli, R., Jurgis Jr, K., Dan, C., Ellen, C., & Louise, K. (1982). Models of helping and coping. *American Psychologist*, 37(4), 368.
- Rosser, A., & Joshi, A. (2013). From user fees to fee free: The politics of realising universal free basic education in Indonesia. *The Journal of Development Studies*, 49(2), 175-189.
- Sarmawa, I. W. G., Suryani, N. K., & Riana, I. G. (2015). Commitment and competency as an organizational citizenship behaviour predictor and its effect on the performance. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(1), 1-13.
- Sarwani, S. (2017). The effect of work discipline and work environment on the performance of employees. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 6(2).
- Somerset, A. (2009). Universalising primary education in Kenya: The elusive goal. *Comparative Education*, 45(2), 233-250.
- Suryawati. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Tilaar, H. A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pelatihan*, Magelang Indonesia Tera.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
- Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- Walton, G. W., & Hushang, H. (2021). The politics of undermining national fee-free education policy: Insights from Papua New Guinea. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 8(3), 401-419.
- Woodall, J. R., Warwick-Booth, L., & Cross, R. (2012). Has empowerment lost its power?. *Health education research*, 27(4), 742-745.